

Implementasi Literasi Digital Berbasis Nilai Pancasila dalam Menangkal Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)

Muhammad Fahlan Arri Pradana¹, Sholikin²

Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer,

Universitas Duta Bangsa Surakarta

Alamat (Jl Bhayangkara No. 55, Tipes, Serengan), Surakarta 57154

Telp. (0271) 719552

E-mail: fahlanpradana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang masif saat ini membawa dampak ganda, yakni kemudahan akses informasi dan ancaman penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan strategi implementasi literasi digital yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya preventif dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan etika digital dan ideologi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan teknis digital saja tidak cukup; diperlukan internalisasi nilai Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, sebagai landasan etika bermedia sosial. Kesimpulannya, Pancasila berfungsi sebagai filter ideologis yang efektif untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam menyaring informasi sebelum menyebarkannya, demi terciptanya ruang digital yang santun dan kondusif.

Kata Kunci: Literasi Digital, Nilai Pancasila, Hoaks, Media Sosial, Etika Digital.

Abstract

The massive development of information technology currently brings a dual impact, namely the ease of access to information and the threat of the spread of fake news (hoaxes) which can divide national unity. This study aims to analyze the urgency and implementation strategy of digital literacy based on Pancasila values as a preventive effort to counter the spread of hoaxes on social media. The research method used is library research by examining various scientific journals, books, and regulations related to digital ethics and state ideology. The results show that technical digital skills alone are not enough; internalization of Pancasila values, especially the principles of Just and Civilized Humanity and Indonesian Unity, is needed as a foundation for social media ethics. In conclusion, Pancasila functions as an effective ideological filter to build public critical awareness in filtering information before disseminating it, in order to create a polite and conducive digital space.

Keywords: Digital Literacy, Pancasila Values, Hoax, Social Media, Digital Ethics

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap interaksi sosial masyarakat secara drastis. Internet dan media sosial kini menjadi kebutuhan primer dalam pertukaran informasi. Namun, kemajuan ini ibarat dua sisi mata uang; di satu sisi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyebaran konten negatif, ujaran kebencian, dan berita bohong (*hoaks*). Fenomena ini menjadi tantangan serius bagi integrasi bangsa Indonesia yang majemuk. Rendahnya tingkat literasi digital, khususnya dalam aspek etika dan budaya digital, menyebabkan masyarakat mudah

terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal ini diperburuk oleh perilaku *sharing without sifting* (membagikan tanpa menyaring) yang sering kali didasari oleh bias emosional atau kelompok.

Dampak dari penyebaran hoaks sangat destruktif karena dapat memicu polarisasi sosial, konflik horizontal, dan degradasi moral bangsa. Kondisi ini secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Pendekatan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang diperlukan, namun penegakan hukum (represif) saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah. Diperlukan pendekatan preventif melalui penguatan karakter pengguna media sosial. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa literasi digital tidak boleh hanya dipahami sebagai kemampuan teknis mengoperasikan perangkat (digital skills), tetapi juga harus mencakup digital ethics yang berlandaskan pada nilai-nilai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan pedoman etika dalam dunia maya. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial seharusnya menjadi filter alami bagi setiap individu dalam beraktivitas di ruang digital. Sayangnya, internalisasi nilai-nilai ini dalam konteks digital masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan sebagai basis literasi digital untuk menangkal penyebaran hoaks. Selain itu, artikel ini juga akan memaparkan strategi implementasi nilai tersebut agar dapat menjadi panduan perilaku masyarakat dalam mewujudkan ruang publik digital yang sehat dan beradab.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji konsep dan teori yang relevan tanpa perlu terjun langsung ke lapangan, melainkan dengan menelaah berbagai literatur yang tersedia. Objek utama dalam penelitian ini adalah konsep literasi digital dan nilai-nilai Pancasila dalam konteks interaksi sosial di dunia maya.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku referensi, prosiding seminar, serta dokumen peraturan perundang-undangan (seperti UU ITE) yang berkaitan dengan etika digital dan penanggulangan berita bohong (*hoaks*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur pada *database* akademik daring. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan deskriptif interpretatif, yaitu dengan menguraikan data-data yang diperoleh, menghubungkan relevansi antara literasi digital dengan sila-sila Pancasila, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Fenomena Penyebaran Hoaks dan Urgensi Etika Digital

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia telah bertransformasi menjadi arena pertarungan informasi yang masif. Fenomena *post-truth*, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan fakta objektif, menjadi lahan subur bagi penyebaran hoaks. Rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat sering kali gagal mengidentifikasi validitas sebuah informasi. Motif penyebaran berita bohong bervariasi, mulai dari ekonomi (clickbait), politik (kampanye hitam), hingga ideologis (radikalisme). Tanpa adanya filter nilai yang kuat, teknologi digital yang seharusnya menjadi alat pemersatu justru berpotensi merusak tatanan sosial (Nama Penulis, Tahun). Oleh karena itu, etika digital yang berakar pada budaya bangsa menjadi kebutuhan mendesak.

3.2 Aktualisasi Nilai Pancasila sebagai Filter Informasi

Pancasila bukan sekadar simbol negara, melainkan sistem nilai yang hidup (*living values*) yang relevan untuk diimplementasikan dalam dunia maya. Berikut adalah analisis nilai Pancasila dalam konteks literasi digital:

3.2.1 Nilai Ketuhanan (Sila Pertama): Sila ini menekankan aspek spiritualitas dan akuntabilitas moral. Dalam konteks digital, nilai ini mengajarkan bahwa setiap tindakan di dunia maya, termasuk menyebarkan informasi, dilihat oleh Tuhan YME dan memiliki konsekuensi dosa jika merugikan orang lain. Kesadaran ini akan melahirkan sikap kehati-hatian dan kejujuran dalam berinteraksi di media sosial.

3.2.2 Nilai Kemanusiaan (Sila Kedua): Sila ini menuntut perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama manusia. Di ruang digital, hal ini bermanifestasi sebagai etika komunikasi yang santun, tidak melakukan perundungan siber (*cyberbullying*), dan menghindari ujaran kebencian (*hate speech*). Pengguna media sosial yang memegang teguh sila ini akan selalu memanusiaikan manusia lain di balik layar (Nama Penulis, Tahun).

3.2.3 Nilai Persatuan (Sila Ketiga): Ini adalah nilai kunci dalam menangkal hoaks yang bernuansa SARA. Sila ini mendorong pengguna untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Prinsip "saring sebelum *sharing*" merupakan wujud nyata pengamalan sila ini untuk mencegah konflik dan menjaga integrasi nasional.

3.2.4 Nilai Kerakyatan (Sila Keempat): Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan. Dalam konteks digital, hal ini berarti kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesimpangsiuran informasi, mekanisme yang ditempuh adalah *tabayyun* (klarifikasi) dan diskusi yang sehat, bukan saling serang di kolom komentar.

3.2.5 Nilai Keadilan (Sila Kelima): Keadilan sosial di era digital mencakup akses informasi yang berimbang dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (tidak melakukan plagiasi). Selain itu, sila ini juga menolak segala bentuk penipuan *online* yang merugikan masyarakat luas.

3.3 Strategi Penguatan Literasi Digital Berbasis Pancasila

Agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi wacana, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diintegrasikan ke dalam kurikulum literasi digital, baik di lingkungan formal (sekolah/kampus) maupun informal (keluarga/masyarakat). Generasi muda perlu dilatih berfikir kritis (*critical thinking*) dalam menganalisis konten digital dengan menjadikan Pancasila sebagai standar kebenaran etis. Pemerintah dan pemuka masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan narasi positif di media sosial untuk menandingi konten negatif, sehingga ruang digital Indonesia menjadi lebih sehat, aman, dan produktif (Nama Penulis, Tahun).

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital yang hanya berfokus pada percakapan teknis belum cukup untuk membendung arus penyebaran berita bohong (*hoaks*) yang mengancam integrasi bangsa. Diperlukan internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika moral dalam bermedia sosial. Kelima sila Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Pemersatu Indonesia, berfungsi sebagai filter ideologis yang efektif untuk membangun kesadaran kritis masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, pengguna media sosial diharapkan mampu melakukan verifikasi informasi dan menahan diri dari menyebarkan konten yang bersifat provokatif atau memecah belah.

Adapun saran untuk penyempurnaan hasil penelitian supaya berdaya guna adalah perlunya kolaborasi sinergis antara pemerintah, institusi pendidikan, dan elemen masyarakat dalam

mengkampanyekan literasi digital berbasis Kebangsaan secara masif. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat empiris, misalnya dengan mengembangkan modul pembelajaran atau aplikasi pengukur skor etika digital berbasis Pancasila, guna melihat efektivitas penerapan nilai-nilai ini secara kuantitatif di kalangan generasi muda.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Ristekdikti.
- Namira, E., dkk., 2022, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pedoman Generasi Milenial dalam Bersikap di Media Sosial, *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3, No. 9 pp. 12-20.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suryaningsih, A., Hidayah, Y., and Pratomo, W. 2024. Penguatan Literasi Digital Melalui Mata Kuliah Umum Pendidikan Pancasila untuk Mengantisipasi Berkembangnya Berita Hoax, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol. 21, No. 1 pp. 45-55.
- Sutrisno, N. W. A. 2024. Etika Komunikasi Media Sosial pada Generasi Zilenial dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol. 5, No. 1 pp. 101-115.